

## PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK

Anas Wahab<sup>1</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Ansyari Mone<sup>3</sup>

- <sup>1</sup>) Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar  
<sup>2</sup>) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar  
<sup>3</sup>) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

### ABSTRACT

*The purpose of this research is describe and explain the influence of village government leadership toward the level of public awareness in possession of an identity card. This kind of research is descriptive quantitaf. Type of research is survey research. The sample are 90 people. Technic of determining sample used the slovin formula and elected the proportionate stratified random sampling from population of 922 people from. Data collection techniques used the distribution of questionnaires and study literature. The result showed a positive effect between village government leadership toward the level of public awareness. The influence of leadership on the level of awareness public in possession of identity card is as many as for 38.31 % and 61.69 % influenced by other factors.*

**Keywords:** leadership, awerness of government, identity card

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan pemerintahan desa terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Tipe penelitian yaitu penelitian *survey*. Sampelnya sebanyak 46 orang masyarakat desa. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* yang dipilih secara *proportionate stratified random sampling* dari populasi 922 orang berdasarkan jenjang pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pembagian kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepemimpinan pemerintahan desa terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk sebesar 38,31% dan 68,69% di pengaruhi oleh faktor lain.

**Kata kunci:** kepemimpinan, kesadaran masyarakat, KTP

## PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan, sebuah “tindakan responsifitas” diambil oleh seluruh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat desa. Semua level pemerintahan berlomba-lomba mendorong warga untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang telah berusia diatas 17 tahun atau yang telah menikah. Namun, masyarakat masih memiliki kesadaran kependudukan yang sangat minim. Hasil dari tindakan ini masih jauh dari harapan.

Tindakan responsifitas ini bermula dari kasus pemilihan umum Tahun 2004 yang masih terkatut pada masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan tidak ada pemecahan masalah yang pasti dari pihak yang berwenang seolah-olah kasus klasik yang tidak ada penyelesaiannya.

Seperti yang dilansir oleh Kompas 4 November 2013 terkait DPT yang dimanipulasi dan tidak jelas merupakan bagian dari kisruh politik dalam pemilihan umum baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Secara jelas dapat dianalogikan bahwa DPT bermasalah karena data kependudukan warga bermasalah hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran warga dalam memiliki kartu tanda penduduk.

Sementara dalam kesadaran kepemilikan kartu tanda penduduk, dibutuhkan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai warga negara yang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan motivasi dari kepemimpinan daerah setempat.

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (1984: 46) menyatakan bahwa “kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu”.

Kesadaran masyarakat merupakan motivasi untuk berperan serta dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan definisi kesadaran menurut Gozali dalam Utomo (2002: 30) menyatakan bahwa kesadaran

adalah kewajiban dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara sukarela dan didukung oleh motivasi dari kepemimpinan daerah setempat misalnya adalah kesadaran dalam memiliki kartu tanda penduduk sebagai warga maupun kesadaran akan kewajiban lainnya.

Djamaludin dalam Utomo (2002: 12) membagi kesadaran masyarakat dapat dilihat dari tiga bagian atau tahap yaitu: (1) *knowledge* (pengetahuan) yaitu pengetahuan tentang disebut lembaga-lembaga dan program-program yang dijalankan; (2) *attitude* (sikap) yaitu melalui tanggapan emosional, pernyataan senang, tidak senang, pernyataan tentang ketidakpercayaan dan tanggapan untuk bertindak; (3) *practice* (tindakan) yaitu pernyataan perilaku seperti ramah, hangat, agresif, maupun apatis terhadap suatu program.

Taliziduhu dalam Utomo (2002: 11) tugas pemimpin terutama kepala desa maupun lurah dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat antara lain rasa percaya, sistem

pemerintahan, layanan civil, dan pelaksanaan pembangunan.

Kepemimpinan baik pada pemerintah daerah kabupaten dan kota maupun pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di pedesaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini selaras dengan definisi kepemimpinan secara etimologi dalam Syafie (2002: 7) bahwa kepemimpinan dalam bahasa Inggris berarti (*leadership*) kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Defenisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Syafie tidak jauh berbeda dengan definisi yang kemukakan oleh Siagian (2002: 62) bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para bawahannya) sedemikian rupa sehingga mau melakukan kehendak

pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya.

Pemimpin dapat dikelompokkan menjadi pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan formal kepemimpinan dalam suatu organisasi formal yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan Negara atau peraturan perusahaan misalnya adalah pemimpin presiden, TNI, Gubernur Bupati, direktur perusahaan dan kepala desa. Sedangkan pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak menduduki jabatan organisasi formal dalam sistem sosial, akan tetapi mempunyai pengaruh pada anggota sistem sosial. Misalnya, para imam, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Tidak semua pemimpin memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat apalagi pada kepala desa, karena pemimpin diciptakan dan tidak sekedar dilahirkan. Maka untuk mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran masyarakat seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik dalam menjalankan

pemerintahannya sehingga bagi masyarakat mengikuti visi, program bahkan perintah dari pemimpin tersebut.

Riberu dalam utomo (2002: 32) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kepemimpinan seorang pemimpin seyogyanya memperhatikan etika profesi pemimpin dan etika profesi pemimpin bersumber dari pemahaman mengenai kepemimpinan tersebut. Tiap pemimpin harus memperhatikan kepentingan umum, kepentingan seluruh kelompok dan kepentingan masing-masing individu dalam kelompok harus diperhitungkan sejauh mungkin dalam menanggapi situasi, dalam menganalisis dan menilai situasi demikian pula dalam mengambil tindakan, begitu pula dalam mengambil tindakan tiap pemimpin harus berusaha agar bagaimanapun juga keselamatan, kebaikan dan kepentingan bawahannya dapat terjamin. Pemimpin adalah otak dan hati bagi kelompok. Tiap pemimpin harus perlu berikrar agar ia menjadi otak utama yang berpikir bagi kepentingan kelompoknya, ia yang

melihat situasi secara tajam dan ia yang menilai situasi secara seimbang. Pemimpin berdiri di tengah-tengah. Supaya dapat menjalankan trifungsi, setiap pemimpin harus berada di tengah-tengah masyarakat, seorang pemimpin akan mengetahui apa yang hidup dan bergerak dalam masyarakat. Diskresi, tahu membedakan. Pemimpin harus tahu apa yang boleh dibicarakan dan apa yang harus di rahasiakan atau yang dimakan. Pemimpin selalu bijaksana. Pemimpin yang bijaksana selalu memperhatikan faktor-faktor yang objektif. Yaitu hal-hal yang melekat pada kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya.

Sifat kepemimpinan secara gamblang telah kemukakan oleh salah satu tokoh pelopor pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro dalam Utomo (2009) dengan falsafah “*ingarso Sung tulodo, ing madyo mangungkarso, tutwuri handayani*” yang dapat penulis simpulkan dari falsafah tersebut adalah seorang; (1) pemimpin harus menjadikan dirinya sebagai panutan dan tauladan malalui sifat dan perbuatannya terutama sifat adil dan jujur dalam menjalankan

tugas; (2) seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat pada bawahannya; (3) seorang pemimpin harus mampu atau sanggup bertanggung jawab bagi orang yang dipimpinya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomani Kecamatan Mangara Bombang Kabupaten Takalar pada bulan Desember 2013 - Januari 2014. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Tipe penelitian berdasarkan pada penelitian survei, suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan variabel-variabel dari responden di lokasi penelitian. Populasi sebanyak 922 orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* dengan hasil penghitungan memperoleh sampel sebanyak 46 orang menggunakan metode *proportionate stratified random*

*sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: untuk mengetahui hubungan tinggi variabel penulis menggunakan penghitungan dengan menggunakan rumus *pearson product moment* sementara pengujian hipotesisnya menggunakan rumus *t*-hitung untuk mengetahui apakah hipotesis alternatif diterima atau ditolak dan mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y maka penulis menggunakan penghitungan dengan koefisien determinan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Mempengaruhi adalah daya dan kekuatan pemimpin yang dipergunakan untuk mengubah sikap, perilaku, pendapat, tujuan, kebutuhan nilai-nilai kemampuan dan tindakan untuk bergerak ke arah tertentu dari pengikut atau bawahan. Memengaruhi adalah proses interaksi sosial antara pemimpin dan pengikut dimana kedua belah pihak secara sistematis berupaya saling mempengaruhi dan saling mengubah sikap perilaku, norma, dan

kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut.

Kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan juga merupakan salah satu kesadaran dalam kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat dianggap sebagai suatu sistem sosial yang mampu mengembangkan dirinya sendiri, yang berisi semua dasar struktural dan fungsional dari suatu subsistem yang independen dimana hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Hukum tidak akan bisa dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir daripada masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat.

Pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan antara lain dalam kepemilikan kartu tanda penduduk yaitu dapat dilihat dari sifat pemimpin yang memotivasi masyarakat tentang kepemilikan kartu tanda penduduk, adil dalam memberikan pelayanan, perilaku pemimpin dapat dijadikan tauladan.

Sifat pertama dorongan dan pemberian motivasi. Sebagaimana besar teori kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi dan tugas pemimpin adalah memotivasi diri dan para pengikutnya. Memotivasi pengikut merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan para pengikut dan teknik memotivasi yang digunakan.

Pemimpin menumbuhkan dan mendorong hasrat keinginan, kesadaran, kemauan, etos kerja untuk bergerak, bertindak dan bekerja dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka melaksanakan semuanya itu dengan penuh kesadaran tidak karena dipaksa ingin dipuji atau mendapatkan imbalan. Mereka melaksanakan semuanya itu karena kewajiban sesuatu yang harus mereka lakukan.

Tanggapan responden menyatakan bahwa pemberian motivasi dari kepala desa menunjukkan: terdapat 26% responden menyatakan bahwa kepala desa selalu memberi motivasi kepada masyarakat tentang kepemilikan KTP, 52% responden menyatakan bahwa kepala desa sering memberi

motivasi kepada masyarakat tentang kepemilikan KTP, 17% responden bahwa kepala desa kadang-kadang memberi motivasi kepada masyarakat tentang kepemilikan KTP, 2 % responden menyatakan bahwa kepala desa tidak pernah memberi motivasi kepada masyarakat tentang kepemilikan KTP. Dilihat dari bentuk dorongan dan motivasi yang diberikan oleh kepala desa di desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang dalam mendorong dan meningkatkan kesadaran dalam kepemilikan kartu tanda penduduk adalah terdiri dari beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala desa baik secara paksa maupun secara halus dapat terlihat pada program pembagian beras miskin (Raskin) yaitu kepala tidak memberi bantuan beras miskin kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan kepala desa melakukan lewat sosialisasi secara intens kepada warga.

Sifat kepemimpinan kedua yang harus ada dalam pemimpin adalah adil dan tidak membedakan antara keluarga maupun kerabat dekat (nepotisme),

kepemimpinan desa adalah kepemimpinan yang biasanya tidak terlepas dari sifat nepotisme karena kepala desa adalah pemimpin tingkat terendah dari pemerintahan yang memiliki tugas untuk membantu negara menjalankan mekanisme pemerintahan di desa. kepala desa adalah pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan paling rentan dalam sikap nepotisme kepemimpinan dalam memberikan pelayanan baik dalam pembuatan KTP dan yang lainnya yang menyangkut administratif warga negaranya.

Tanggapan responden tentang sifat keadilan kepemimpinan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan menunjukan bahwa 13% responden menyatakan kepala desa sangat adil dalam memberikan pelayanan dalam kepemilikan kartu tanda penduduk, 41% responden yang menyatakan adil dalam memberikan pelayanan, 23 % responden yang menyatakan bahwa kepala desa kurang adil dalam memberikan pelayanan KTP, sementara 4% responden menyatakan bahwa kepala desa tidak

adil dalam memberikan pelayanan terhadap kepemilikan KTP. Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang adil dalam memberikan pelayanan terhadap kepemilikan KTP di desa Bontomanai, sehingga dapat dapat mendorong kesadaran warga dalam memiliki kartu tanda penduduk.

Sifat ketiga yaitu perilaku kepala desa diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan dapat di jadikan panutan Berdasarkan tanggapan responden tentang perilaku kepala desa yang dapat di jadikan panutan atau teladan bahwa 43 % responden mengatakan bahwa perilaku kepala desa sangat dapat dijadikan panutan, 45% responden mengatakan bahwa perilaku kepala desa dapat dijadikan contoh, 8 % responden mengatakan bahwa perilaku kepala desa kurang dapat di jadikan panutan, sementara itu hanya 2 % mengatakan bahwa perilaku kepala desa tidak dapat di jadikan panutan. Berdasarkan penggaran diatas di simpulkan bahwa perilaku kepala desa Bontomanai adalah seorang pemimpin yang memiliki perilaku



yang baik sehingga dapat dijadikan penutan bagi masyarakat setempat.

Dari variabel yang dibahas bahwa masyarakat dapat dikatakan sadar dapat dilihat pengetahuan masyarakat tentang KTP dan perilaku masyarakat.

Pengetahuan masyarakat dapat menentukan tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk. Masyarakat tidak akan sadar sepenuhnya untuk memiliki KTP ketika ia tidak tahu kegunaan dari KTP. Kegunaan KTP adalah identitas diri dalam kehidupan warga Negara dan dianggap legal untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan urusan administratif. Maka dari itu memiliki KTP merupakan kewajiban bagi warga Negara yang telah berusia 17 tahun maupun yang sudah menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang mengetahui kewajiban memiliki KTP dapat menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan sangat mengetahui kewajiban memiliki KTP, 39% responden cukup mengetahui kewajiban memiliki KTP, 11% responden menyatakan

kurang mengetahui kewajiban memiliki KTP. Sementara itu tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban memiliki KTP.

Berdasarkan tanggapan responden diatas menunjukan bahwa semua masyarakat telah mengetahui kewajiban dalam memiliki KTP namun tingkat pengetahuannya berbeda-beda hal ini karena fakto rpendidikan masyarakat dan pengetahuan masyarakat juga berbeda-beda.

Fungsi KTP yaitu memberikan kepastian bahwa pemegang KTP terdaftar sebagai warga Negara yang sah. Kepemilikan KTP juga menjamin hak-hak pemegangnya sebagai penduduk yang diatur dalam peraturan penrundang-undangan yang berlaku. KTP berfungsi sebagai identitas diri (kartu pengenal) yang umum diterima di instansi manapun sebagai bukti bahwa kita sudah dianggap dewasa. untuk melakukan berbagai macam tindakan, seperti membuka rekening di bank, mengadakan transaksi jual beli, sewa-menyewa, peminjaman barang, dan pembuatan SIM.

Untuk melihat sejauh mana masyarakat desa Bontomanai mengetahui kegunaan dan fungsi KTP dapat diketahui dari tanggapan responden sebagai berikut: 39% responden menyatakan bahwa masyarakat sangat mengetahui kegunaan dari kartu tanda penduduk, 48% responden menyatakan bahwa masyarakat cukup mengetahui kegunaan dari kartu tanda penduduk, 13% responden menyatakan masyarakat desa kurang mengetahui kegunaan dari kartu tanda penduduk. Sementara itu tidak ada responden yang menyatakan masyarakat benar-benar tidak mengetahui kegunaan dari kartu tanda penduduk. Maka, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengetahui kegunaan dari kartu tanda penduduk.

Perilaku masyarakat yang sadar akan pentingnya memiliki kartu tanda penduduk adalah dilihat dari dorongan dan antusiasme masyarakat dalam kepemilikan serta kesediaan membantu pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat lainya dalam meningkatkan kesadaran kepemilikan KTP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang dorongan untuk memiliki KTP adalah 53% responden menyatakan sangat terdorong untuk memiliki kartu tanda penduduk, 37% responden menyatakan bahwa cukup terdorong untuk memiliki kartu tanda penduduk, 10% responden menyatakan masyarakat kurang terdorong untuk memiliki kartu tanda penduduk. Sementara itu tidak ada responden yang menyatakan bahwa masyarakat tidak merasa terdorong untuk memiliki kartu tanda penduduk.

Kesediaan masyarakat dalam membantu pemerintahan desa untuk sosialisasi pentingnya kepemilikan KTP dapat dilihat pada tanggapan responden berikut ini: 24% responden menyatakan sangat bersedia membantu pemerintahan desa untuk sosialisasi kartu tanda penduduk ke warga desa yang lain, 43% responden menyatakan bahwa cukup bersedia membantu pemerintahan desa untuk sosialisasi kepada warga desa yang lain, 3% responden menyatakan kurang bersedia membantu pemerintahan

desa untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kartu tanda penduduk. Sementara itu tidak ada responden yang menyatakan bahwa tidak bersedia membantu kepala desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat lain tentang pentingnya kepemilikan kartu tanda penduduk.

Tingkat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran

masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk dapat dilihat dari jawaban responden pada masing-masing variabel diklasifikasikan atas: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka terlebih dahulu ditentukan dengan skala interval sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Klasifikasi Data**

No	Skor	Frek	%	Klasifikasi
<b>Variabel Kepemimpinan (X)</b>				
1	54-60	8	17%	Sangat tinggi
2	47-53	17	37%	Tinggi
3	40-46	10	22%	Sedang
4	33-39	5	10%	Rendah
5	26-32	6	13%	Sangat rendah
<b>Variabel kesadaran masyarakat (Y)</b>				
1	40-43	5	10%	Sangat tinggi
2	36-39	20	43%	Tinggi
3	32-35	13	29%	Sedang
4	28-31	3	6%	Rendah
5	23-27	5	10%	Sangat rendah

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada variabel kepemimpinan (X) dari 46 responden, 17% responden memiliki skor 54-60, 37% responden memiliki skor 47-53, 22% responden memiliki skor 40-46, 10% responden memiliki skor 33-39, 13% responden memiliki

skor 26-32. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa Bontomanai dikategorikan tinggi.

Sedangkan Variabel (Y) diketahui bahwa 46 responden, 10% responden memiliki skor 40-43, 43% responden memiliki skor 36-39,

29% responden memiliki skor 32-35, interpretasi terhadap kuat atau 6% responden memiliki skor 28-31, rendahnya hubungan dari kedua

**Table 2.**  
**Kriteria Penilaian**

Interval koefisien	Kriteria
0,00 - 0.199	Sangat rendah
0,20 - 3,99	Rendah
0.40 - 5,99	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber : Hasil olah data

10% responden memiliki skor 23-27. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat desa Bontomanai dikategorikan tinggi.

Analisis penelitian yaitu Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepemimpinan kepala desa dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk digunakan rumus *korelasi product moment* untuk mencari koefisien korelasi antara kedua variabel dengan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 0.619 antara kepemimpinan pemerintahan desa Bontomanai dengan tingkat kesadaran masyarakat desa Bontomanai. Untuk memberi

variabel berdasarkan nilai  $r$  (koefisien koralasi) berpedoman pada angka yang kemukakan oleh Sugiono (2003: 214)

Berdasarkan tabel tersebut maka koefisien koralasi yang di temukan sebesar 0,619 termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Hubungan tersebut baru berlaku untuk sampel yang berjumlah 46 orang. Untuk menguji signifikansi apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku bagi populasi sebanyak 922 orang maka perlu diuji signifikansinya dengan menggunakan rumus  $t$  dalam Sugiono (2003: 214).

Harga t-hitung diuji kemudian dibandingkan dengan t-tabel untuk kesalahan 5% uji 2 fihak dengan  $dk = n-2=44$  diketahui t-table adalah 2,021 sedangkan t-hitung yang di peroleh adalah 5,227 dengan demikian dapat diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-table ( $5,227 > 2,021$ ). Berdasarkan penghitungan maka di nyatakan t-hitung jatuh pada daerah penolakan  $H_0$ , maka dinyatakan hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk ditolak. Dan hipotesis alternati diterima. Jadi kesimpulan koefisien korelasi antara pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat sebesar 0.619 adalah signifikan, artinya koefisien tersebut dapat di generalisasikan atau dapat berlaku dimana sampel yang 10 orang diambil.

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan seperti pada hitungan berikut ini:

$$\begin{aligned} KP &= (r_{xy})^2 \times 100\% \\ &= 0.3831 \times 100\% \\ &= 38.31\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti bahwa yang terjadi pada variabel kesadaran masyarakat 38.31% ditentukan oleh varian yang terjadi variabel pengaruh kepemimpinan. Atau pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kesadaran masyarakat sebesar 38,31% dan sisanya 62,69% ditentukan oleh faktor lain antara lain kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan masyarakat dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa Bontomanai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk.

Pengaruh kepemimpinan pemerintahan desa terhadap kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sebesar 38,31% berarti 61.69% lagi yang mempengaruhi kesadaran

masyarakat adalah faktor lain dari dalam masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya. 2002. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Draha, Taliziduhu. 1996. *Prospek pemerintahan Desa Pada Milenium ke tiga. Jurnal Pemerintahan, Edisi Ke Enam*, Jakarta: MIPI.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompas, 4 November 2014. Penetapan DPT Nasional. Halaman 11.
- Oktaliana, Fanie. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Skripsi. Medan: Univesitas Sumatra Utara.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Magasung.
- Siswosoediro, Hanry S. 2010. *Panduan Praktis, Mengurus Surat-Surat Kependudukan Dan Identitas Diri*. Cianjur: Media pustaka.
- Sudirwo, Daeng. 1980. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi* Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2000. *Alquran dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utomo, Susilo Pudji. 2002. *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di kecamatan Karang Tengah Kab. Demak*. Tesis Undep. Semarang.
- Yasin Limpo Syahrul. 2007. *Ambil Tanganku, Ku Ambil Tanganmu*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Widjaja. 1984. *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirawan. 2013. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.